

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah berdirinya Partai kebangkitan bangsa (PKB) tidak terlepas dari organisasi masa terbesar Nahdhotul Ulama dan para Ulama yang ada di dalamnya dan menjadi panutan massa yang sangat besar. Khususnya peran K.H Abdurahman Wahid selaku ketua PBNU dan umumnya tokoh-tokoh NU sangat penting dalam kelahiran dan penampilan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam pemilu 1999. Didirikan oleh tokoh-tokoh utama Nahdatul Ulama (NU) seperti K. H Abdurahman Wahid (Gus dur), Kyai Musafa Bisri, Kyai Muchit Muzadi, Kyai Ilyas Ruschiyad, dan lainnya, PKB dideklarasikan di kediaman ketua umum PBNU K.H Abdurahman Wahid, Ciganjur, Jakarta Selatan, pada 23 Juli 1998. Seperti dikatakan ketua umum PBNU Abdurahman Wahid pada pendeklarasian partai kebangkitan bangsa, PKB didirikan untuk menjawab dua permasalahan *pertama: "NU tidak berpolitik praktis seperti digariskan pada muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo, Jawa Timur.kedua memberi wadah bagi aspirasi politik setiap warga NU yang di perkirakan sekitar 40 juta jiwa"*. Pada periode pertama PKB ini didirikan. Ketua umumnya sendiri adalah Matori Abdul Jalil yang dikenal sebagai tokoh PPP, bukan tokoh NU¹.

¹Hamad, Ibnu . *Konstruksi realitas politik dalam media massa: sebuah study critical disourse analysis terhadap berita-berita politik* ; pengantar. harsono suwardi – edisi 1,jakarta: granit 2004 (hal 100-101)

Sebagai kekuatan politik potensi besar NU terlihat jelas pada pemilu 10 partai tahun 1971 dimana NU memiliki posisi ke-2 setelah Golkar. Namun pada pemilu tahun 1999 dimana NU Sudah tidak menjadi partai politik lagi, namun dengan melihat gejala politik saat itu maka NU sebagai organisasi masa islam terbesar di Indonesia berinisiatif untuk mendirikan sebuah partai politik yang di beri nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) namun pada perjalananya tidak semua warga NU ikut PKB. Pada pertemuan pematangan di Bandung (Pertemuan Bandung), terdapat 39 usulan nama partai atas nama NU, walaupun akhirnya hanya menjadi tiga saja: Nahdatul Umah, Kebangkitan Umah, dan Kebangkitan Bangsa. Dengan kata lain, tak lepas dari induknya, basis dukungan PKB adalah warga NU, termasuk didalamnya Ansor, PMII, Fatayat, AMNU, GMNU, dan apa yang dinamakan Gus dur fans klub yang tidak terbatas pada warga NU semata².

Pangkal perjuangan PKB adalah *humanisme religius* dengan prioritas perjuangan saat itu adalah pengembalian kedaulatan rakyat, keadilan, dan *persatuan*. Dengan kata lain, konsisten dengan negara kesatuan, tetapi dengan pembagian kue yang adil. Demikian pula dengan tatanan kekuasaan negara, bagi PKB harus ada pemisahan tegas antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Di bidang ekonomi, PKB memperjuangkan transformasi ekonomi pertumbuhan menjadi ekonomi kerakyatan yang pengembangan bisnisnya sesuai dengan potensi Negara (pertanian).³

² Ibid.,

³ Ibid.,

Akhirnya pada tahun 1999 PKB mulai mengikuti pemilu yang pertama kalinya dan kembali mengikuti pemilu pada tahun 2004 hingga saat ini pada pemilu 2009, dengan perolehan suara yang cukup besar, akan tetapi belum mencapai pada tingkat memenangkan pemilu

Namun seiring berjalanya waktu, partai ini selalu di rundung permasalahan internal yang menyebabkan konflik di tubuh partai kebangkitan bangsa ini, menurut catatan penulis konflik-konflik besar yang terjadi di dalam tubuh partai kebangkitan bangsa yang merupakan saluran politik warga nahdhiyin ini adalah⁴:

1. Konflik dengan ketua dewan tahfidz pertama Matori Abdul Jalil
2. Konflik dengan ketua dewan tahfidz kedua Dr. Alwi Sihab, Saifullah Yusuf, A.S Hikam, Khofifah I.P, Khoirul Anam yang juga di dukung oleh ulama-ulama kharismatik NU, yang di sebut dengan PKB poros langitan Di ketuai oleh KH Abdulloh Faqih yang pada ahirnya harus keluar dari PKB dan mendirikan partai kebangkitan nasional ulama (PKNU)
3. Konflik antara Gus Dur dengan ketua dewan tahfidz Muhaimin Iskandar hasil muktamar II semarang yang menjadikan ada kubu PKB Gus Dur (PKB parung) dan muhaimin (PKB ancol)

Dari sejarah konflik yang terjadi di PKB di atas, yang menjadi perhatian dan pembahasan pada skripsi ini adalah Konflik dua kubu PKB kubu Gus dur dengan kyai-kyai khos yang di sebut dengan PKB poros langitan Di ketuai oleh KH Abdulloh

⁴ Nahrwi, imam, *moralitas politik PKB, Aktualisasi PKB sebagai partai kerja, partai nasinal dan partai modern*, MALANG, Averroes press, 2005 Halm 60-63. Lihat juga dalam <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0805/06/nas08.html>

Faqih yang pada ahirnya harus keluar dari PKB dan mendirikan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan konflik dengan ketua dewan tahfidznya Muhaimin Iskandar, di mana konflik ini dapat di katakan sebagai konflik yang tak berujung dan merugikan partai ini sendiri, bagai mana tidak, efek dari konflik ini adalah menurunnya suara PKB pada pemilu 2009. ketika partai lain sibuk berkonsolidasi guna pemenangan pemilu yang di lakukan mulai DPP hingga ke daerah namun partai ini malah lebih di sibukan dengan konflik yang tak berujung hinga pemilu 2009 di mulai. Bila kita membandingkan data statistik perolehan suara PKB pada pemilu 2009 dengan pemilu sebelumnya, terdapat fakta sebagai berikut:

Sumber: Di olah dari data perolehan suara Pemilu 1999 2004 dan 2009 KPU Pusat.

TABLE 1.1⁵

**REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA SECARA NASIONAL PARTAI
PARTAI BESAR PADA PEMILU 1999, 2004 DAN 2009**

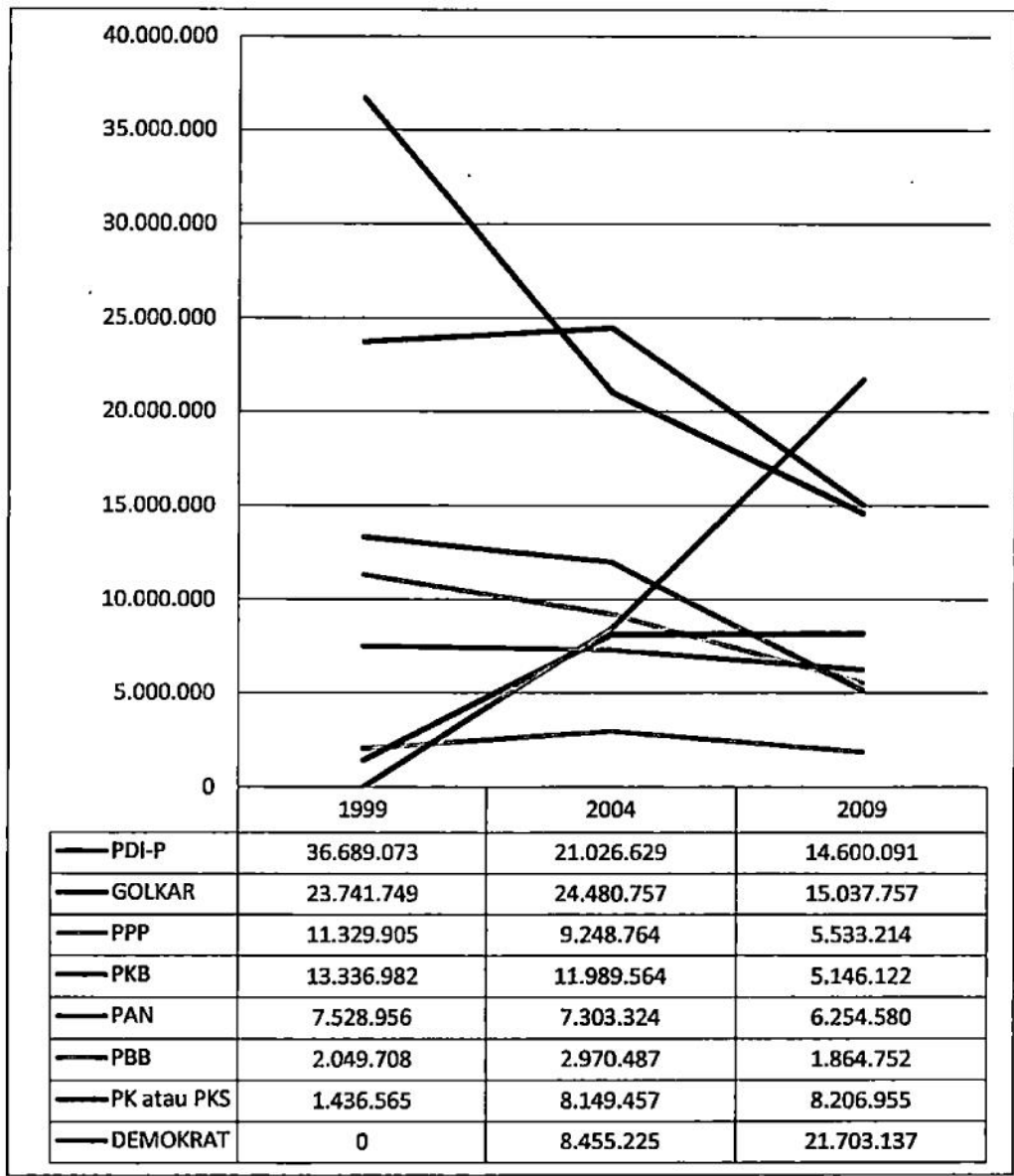
No 1	Partai Politik	Perolehan suara 1999	Perolehan suara 2004	Perolehan suara 2009
1	PDI-P	36.689.073 (33,8%)	21.026.629(18,5%)	14.600.091(14%)
2	GOLKAR	23.741.749(22,5%)	24.480.757(21,6%)	15.037.757(14.4%)
3	PPP	11.329.905 (10,7%)	9.248.764(8,1%)	5.533.214(5.3%)
4	PKB	13.336.982 (12,6%)	11.989.564(10.6%)	5.146.122(4.9%)
5	PAN	7.528.956 (7.1%)	7.303.324(6.4%)	6.254.580(6%)
6	PBB	2.049.708 (1,9%)	2.970.487(3.2%)	1.864.725(1.7%)
7	PK atau PKS	1.436.565 (1.4%)	8.149.457(7.2%)	8.206.955(7,8%)
8	DEMOKRAT	0	8.455.225(7,4)	21.703.137(20,8%)

⁵ Marjuansah, "analisis factor-faktor yang mempengaruhi perolehansuara PAN di DIY pada pemilu 2004" Skripsi IP UMY 2009

Untuk mempermudah memahami penurunan suara PKB (dalam grafik berwarna hijau) secara nasional dari pemilu tahun 1999, 2004 dan 2009 akan di sajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut :

GRAFIK 1.1

GRAFIK REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA SAH NASIONAL PADA PEMILU 1999 2004 DAN 2009



dari data grafik rekapitulasi perolehan suara sah nasional, perbandingan perolehan suara PKB pada pemilu 1999, 2004 dan 2009 diatas, pada pemilu yang pertama PKB dapat menduduki peringkat empat besar perolehan suara terbanyak setelah PDI P, Golkar, PPP, meskipun secara kuantitas suara sah nasional PKB berada di atas PPP namun karena undang-undang menetapkan bilangan pembagi pemilih dengan system distrik atau dapil maka perolehan kursi PKB di DPR sebesar 51 kursi, masih di bawah PPP 58 kursi legislatif, Sedangkan pada pemilu 2004, PKB memang mengalami penurunan perolehan suara sebesar 1.347.418 (2,05 %) suara dengan menduduki peringkat kelima. Akan tetapi PKB mengalami peningkatan perolehan jumlah kursi, dari 51 kursi pada pemilu 1999 menjadi 52 kursi pada pemilu 2004. Namun pada pemilu 2009 suara PKB menurun drastis apabila dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pada pemilu kali ini PKB hanya mendapatkan 5.146.122 (4,94 %) atau terjadi penurunan sebesar 6.843.442 (50,63 %) dan hanya mendapatkan 28 kursi di DPR. Ini artinya terjadi penurunan besar-besaran perolehan suara di PKB pada pemilu legislative 2009 dan ini menjadi kerugian yang sangat besar bagi partai politik yang memiliki basis masa warga nahdiiyin yang sangat besar jumlahnya di Indonesia.

Sementara itu untuk perolehan suara PKB di provinsi Yogyakarta sendiri sebagai berikut:

TABEL 1.2**PEROLEHAN SUARA PARTAI BESAR PADA PEMILU 1999 DI DIY**

No.	Nama	Yk	Bantul	Sleman	GK	KP	Jumlah	%
1.	PDIP	97.972	148.558	189.527	134.586	72.559	643.202	35,65
2.	PAN	59.108	80.063	100.832	38.152	33.464	311.619	17,27
3.	Golkar	27.438	52.850	61.762	79.797	36.898	258.745	14,34
4.	PKB	11.290	87.364	73.069	43.517	42.000	257.240	14,26
5.	PPP	12.430	25.138	27.601	12.131	10.565	87.865	4,87
6.	PK	4.467	6.290	10.609	2.624	3.818	27.808	1,54

Sumber: Di olah dari data perolehan suara Pemilu 1999 KPUD DIY

TABEL 1.3**PEROLEHAN SUARA PARTAI BESAR PADA PEMILU 2004 DI DIY**

No.	Nama	Yk	Bantul	Sleman	GK	KP	Jumlah	%
1.	PDIP	59.758	107.912	104.288	99.839	49.840	421.637	17.15%
2.	PAN	52.848	34.640	99.216	56.761	39.197	282.662	11.49%
3.	Golkar	23.804	22.978	50.610	99.563	34.091	231.046	9.40%
4.	PKB	6.539	26.025	60.121	31.463	30.319	154.467	6.28%
5.	PKS	24.990	13.612	47.644	16.802	16.372	119.42	4.86%
6	PPP	11.454	8.958	26.729	12.191	12.146	71.478	2.91%
7	PKPB	2.537	13.579	14.562	16.350	8.021	55.049	2.24%
8	PD	20.991	7.948	26.082	11.590	10.841	77.452	3.15%
9	PBB	3.157	3.268	4.778	13.991	3.382	28.576	1.16%

Sumber: Di olah dari data perolehan suara Pemilu 2004 KPUD DIY

TABEL 1.4

PEROLEHAN SUARA PARTAI BESAR PADA PEMILU2009

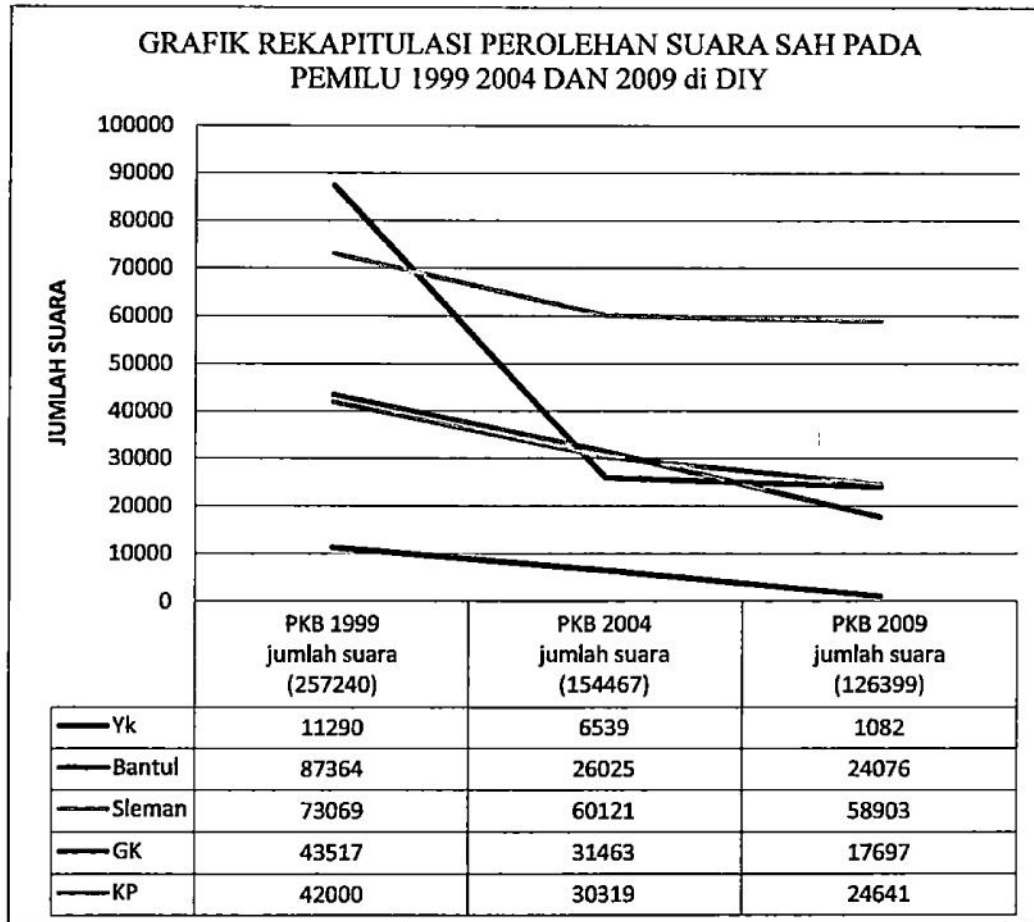
No.	Nama	Yk	Bantul	Sleman	GK	KP	Jumlah
1.	PDI-P	42.554	106.435	84.378	67.633	32.320	333,320
2.	P D	50.405	72.189	76.120	62.716	29.122	290,552
3.	PAN	26.414	50.879	57.456	66.963	34.678	236,390
4	Golkar	15.800	41.126	49.784	49.255	24.743	180,708
5.	PKS	23.118	46.346	63.806	21.314	22.061	176,645
6	PKB	1.082	24.076	58.903	17.697	24.641	126,399
7	Gerinda	9.070	18.386	19.051	14.808	9.083	70,398
8	PPP	12.423	23.052	22.366	6.815	11.910	76,566
9	PKPB	1.265	9.583	6.059	9.681	4.584	31,172
10	Hanura	3.634	10,003	11,284	8,006	3,935	36,852

Sumber : Di olah dari data perolehan suara Pemilu pada situs KPU DIY

Dari pemaparan table di atas, perolehan suara partai kebangkitan bangsa khususnya di provinsi Yogyakarta pada pemilu tahun 2004 sebesar **154.467** suara dengan **(6 kursi DPRD I)** itu artinya partai kebangkitan bangsa mengalami penurunan sebesar **102.773** suara dari pemilu 1999 yang memperoleh suara sebesar **257.240 (14,26%)** .ternyata grafik penurunan suara partai kebangkitan tidak cukup sampai pada pemilu 2004 saja, namun pada pemilu 2009 perolehan suara yang dapat di raih oleh partai kebangkitan bangsa juga mengalami penurunan kembali dari pada pemilu 1999 dan pemilu 2004 dengan perolehan suara sebesar **126,399** suara dengan **(5 kursi DPRD I)**.

Untuk mempermudah memahami penurunan suara PKB di daerah istimewa Yogyakarta dari pemilu tahun 1999, 2004 dan 2009 akan di sajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut :

GRAFIK 1.2



Dari pemaparan data-data di atas mengenai menurunnya suara PKB baik secara nasional maupun di DIY sendiri, tentunya memiliki hubungan kausalitas dan sebab akibat. Untuk itulah penulis ingin meneliti dari kasus menurunnya suara PKB ini dan mencari sebab-akibat dari kasus di atas.

B. Fokus Penelitian

Mengingat keterbatasan data dan informasi yang diperoleh penulis maka dalam penulisan skripsi ini hanya terbatas pada :

Faktor penyebab menurunnya suara Partai Kebangkitan bangsa PKB khususnya di wilayah Yogyakarta pada pemilu legislative 2009

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diatas, penelitian ini perlu dipertegas rumusan masalahnya, yaitu: Faktor-faktor apa yang menyebabkan menurunnya suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) khususnya Di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pemilu 2009?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Sebagai Partai politik yang memiliki basis masa yang *pasti* yaitu NU, bahkan kelahirannya pun di dukung secara penuh oleh PBNU (Pengurus Besar Nahdotul Ulama) yang yang memiliki masa sekitar 40 juta lebih di indonesia⁶, dan mampu memperoleh suara cukup signifikan di pemilu 1999 dan 2004 namun pada pemilu 2009 mengalami penurunan yang sangat signifikan lebih dari 50% suara, hal ini menurut penulis sangat menarik untuk diteliti:“Untuk mengetahui Faktor-faktor yang

⁶ Hamad, Ibnu , Opcit hal 100-101

menyebabkan menurunnya suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) khususnya di daerah istimewa Yogyakarta dalam pemilu 2009”

Adapun manfaat dari penelitian ini *Secara teoritis* yaitu: selain untuk menambah wacana teoritis, diharapkan hasil penelitian ini akan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang studi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Sedangkan *manfaat praktis* dari penelitian ini, diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan dapat memberikan kontribusi yang dapat di gunakan oleh partai kebangkitan bangsa sebagai acuan untuk mengelola dan memajemen partai ini kedepanya dan bahan untuk autokritik bagi Partai Kebangkitan Bangsa untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan dalam manajemen partai saat menghadapi pemilu yang mengakibatkan penurunan suara partai.

E. Kerangka Dasar Teori

1. Pemilihan Umum

Dalam ilmu politik dikenal dua macam pemahaman tentang demokrasi. *Pertama*, pemahaman demokrasi secara normatif. *Kedua*, pemahaman demokrasi secara empirik. Dalam pemahaman normatif, demokrasi merupakan suatu kondisi yang secara ideal ingin diselenggarakan oleh suatu negara. Sedangkan dalam pemahaman empirik, demokrasi dikaitkan dengan kenyataan penerapan demokrasi dalam tataran kehidupan politik praktis⁷. Indonesia, dalam pemahaman normatif,

⁷ Afan Gaffar, “Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hal. 3-4.

dalam tataran kehidupan politik praktis⁷. Indonesia, dalam pemahaman normatif, mencantumkan keinginannya untuk menjalankan sistem demokrasi dalam UUD 1945. Namun yang menarik untuk diamati adalah bahwa pemahaman demokrasi secara normatif tersebut belum tentu terwujud secara empirik dalam kehidupan politik.

Untuk melihat apakah demokrasi yang normatif diterapkan dengan baik dalam kehidupan politik secara empirik, para ahli politik membuat berbagai indikator untuk mengukurnya. Antara lain Huntington yang mendefinisikan demokrasi sebagai suatu sistem politik dimana para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat didalam sistem politik, para calon secara bebas bersaing untuk mendapatkan suara, dan hampir semua penduduk dewasa berhak untuk memberikan suaranya. Selain itu, demokrasi juga mensyaratkan adanya kebebasan sipil dan politik, yaitu adanya kebebasan untuk berbicara, berpendapat, berkumpul, berorganisasi, yang dibutuhkan untuk perdebatan politik, dan pelaksanaan kampanye pemilihan umum. Suatu sistem dikatakan tidak demokratis bila oposisi dikontrol dan dihalangi dalam mencapai apa yang dapat dilakukannya, seperti koran-koran oposisi dibredel, hasil pemungutan suara dimanipulasi atau perhitungan suara tidak benar⁸.

Sedangkan Dahl mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah sistem politik dimana para anggotanya saling memandang antara yang satu dengan yang lainnya

⁷ Afan Gaffar, "*Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hal. 3-4.

⁸ Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1995, hal. 5.

sebagai orang-orang yang sama dalam segi politik, secara bersama-sama berdaulat, memiliki kemampuan, sumber daya, dan lembaga-lembaga yang mereka perlukan untuk memerintah diri mereka sendiri. Indikator demokrasi yang diajukan Dahl adalah sebagai berikut:⁹

- a. Adanya kontrol terhadap kebijakan pemerintah.
- b. Adanya pemilihan umum yang diadakan secara damai dalam jangka waktu tertentu, terbuka, dan bebas.
- c. Semua orang dewasa mempunyai hak untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum.
- d. Hampir semua orang dewasa mempunyai hak untuk mencalonkan diri sebagai kandidat dalam pemilihan umum.
- e. Setiap warga negara memiliki hak politik, seperti kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat, termasuk didalamnya mengkritik pemerintah.
- f. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan akses informasi alternatif yang tidak dimonopoli oleh pemerintah atau kelompok tunggal lain.
- g. Setiap warga negara berhak untuk membentuk dan bergabung dengan lembaga-lembaga otonom, termasuk partai politik dan kelompok kepentingan yang berusaha untuk mempengaruhi pemerintah dengan mengikuti pemilihan umum dan dengan perangkat-perangkat lainnya.

Malihat pendapat Huntington maupun Dahl tersebut, maka jelas bahwa adanya pemilihan umum yang dilaksanakan secara damai dalam jangka waktu

⁹ Robert Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1992, hal. 1.

tertentu, terbuka, bebas dan partai-partai politik yang eksis sebagai peserta pemilu merupakan indikator demokrasi dalam kehidupan suatu sistem politik.

Pelaksanaan Pemilu 2009 didasarkan pada UU no. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana disebutkan:

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (pasal 1)

Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (pasal 2)

Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. (pasal 3)

- 1) Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali;
- 2) Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:
 - a) pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
 - b) pendaftaran Peserta Pemilu;
 - c) penetapan Peserta Pemilu;
 - d) penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
 - e) pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
 - f) masa kampanye
 - g) masa tenang
 - h) pemungutan dan penghitungan suara
 - i) penetapan hasil Pemilu, dan
 - j) pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- 3) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan (pasal 5)¹⁰

Dari pasal-pasal tersebut bisa dilihat upaya konstitusional untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis, sebagaimana dimaksudkan Dahl.

¹⁰ Lihat UU no 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum

Setidaknya, meminjam istilah Afan Gaffar, undang-undang tersebut mencerminkan pemilu yang ingin diwujudkan pada tataran empirik dari aspek pemahaman demokrasi secara normatif.

Supaya pemilu bisa berjalan secara damai, terbuka, dan bebas, sudah barang tentu diperlukan sebuah sistem pemilu yang disepakati bersama. Sistem pemilu dalam ilmu politik dipahami sebagai suatu kumpulan metode atau cara warga masyarakat memilih para wakil mereka, baik yang berada dilembaga legislatif (DPD, DPR, DPRD) ataupun jabatan politik eksekutif (Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota).

Sistem pemilihan merupakan mekanisme untuk menentukan komposisi dalam jabatan politik atau jabatan pemerintahan. Sistem pemilihan menyediakan sarana utama bagi partisipasi politik para individu yang hidup dalam masyarakat yang luas, kompleks, dan modern. Banyak sarjana berpendapat bahwa sistem pemilihan merupakan suatu ciri tegas sebuah sistem demokrasi¹¹.

2. Sistem Pemilu

Supaya Pemilihan umum dapat berjalan sukses maka diperlukan sebuah sistem pemilu. Tidak diragukan lagi bahwa sistem pemilihan umum memainkan peranan penting dalam sebuah sistem politik, walaupun tidak dapat kesepakatan mengenai seberapa penting sistem pemilihan umum dalam membangun struktur sebuah sistem politik. Giofani Sartori menyebutkan bahwa sistem pemilihan umum

¹¹ Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory*, Oxford University Press, New York, 1960, hal. 72-106 dalam skripsi marjuansah.

adalah “sebuah bagian yang paling isensial dari kerja sistem politik. Pemilihan umum bukan hanya instrumen politik yang paling mudah di manipulasi, ia juga membentuk sistem kepartaian dan mempengaruhi spektrum representasi”. Tekanan juga diberikan oleh *Arend Lijphart* yang mengatakan “sistem pemilihan umum adalah elemen paling mendasar dari demokrasi perwakilan”.

Menurut *Benjueno Theodore*, istilah sistem pemilu memiliki definisi yang sempit dan ketat. Yaitu : ‘sistem pemilihan umum adalah rangkaian aturan dimana pemilih mengekspresikan preferensi politik mereka, dan suara para pemilih diterjemahkan menjadi kursi.¹²

Difinisi ini mengisyaratkan bahwa sistem pemilihan umum mengandung elemen-elemen struktur kertas suara dan cara pemberian suara, besar distrik, serta penerjemahan suara menjadi kursi. Dengan demikian hal-hal seperti seperti administrasi pemilihan umum dan hak pilih, walaupun penting berada di luar lingkup pembahasan sistem pemilihan umum. Adapun elemen dari sistem pemilihan umum adalah¹³ :

a. Besaran Distrik

Yang dimaksud dengan distrik adalah wilayah geografis suatu negara yang batas-batasnya dihasilkan melalui suatu pembagian untuk tujuan

¹²Khanafi, “peran HMI DIPO cabang yogyakarta dalam pergulatan politik pada pemilu 2009” Skripsi, IP UMY 2009 hal 26-33 lihat juga [www.blogspot.com/Theodore Benjueno, Sistem Pemilihan Umum : Pemilu Indonesia. Com](http://www.blogspot.com/Theodore%20Benjueno,%20Sistem%20Pemilihan%20Umum%20%3A%20Pemilu%20Indonesia.com) 10 April 2010

¹³ Ibid,

pemilihan umum. Dengan demikian luas sebuah distrik dapat sama besar dengan besar wilayah administrasi pemerintahan, dapat pula berbeda. Definisi besar distrik adalah berapa banyak anggota lembaga perwakilan yang akan dipilih dalam satu distrik pemilihan. Besar distrik bukan berarti berapa jumlah pemilih yang ada dalam distrik tersebut. Berdasarkan definisi tersebut maka kita dapat membedakan distrik menjadi distrik beranggota tunggal (*single member district*) dan distrik beranggota jamak (*multi member district*)

TABEL 1.6¹⁴
DISTRIK BERANGGOTA JAMAK

Jumlah Kursi yang Diperebutkan	Sub Kategori
2-5	Distrik Kecil
6-10	Distrik sedang
> 10	Distrik Besar

Sumber : www.blogspot.com/ Theodore Benjuino, *Sistem Pemilihan Umum : Pemilu Indonesia*. Com 10 April 2010 dalam Khanafi, "peran HMI DIPO cabang yogyakarta dalam pergulatan politik pada pemilu 2009" Skripsi, IP UMY 2009

b. Struktur Kertas Suara

Struktur kertas suara adalah cara penyajian pilihan di atas kertas suara. Cara penyajian pilihan ini menentukan bagaimana pemilih kemudian memberikan suara. Jenis pilihan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kategorikal dimana pemilih hanya memilih satu partai atau calon, dan

¹⁴ Ibid, hal 31

ordinal dimana pemilih memiliki kebebasan lebih dan dapat menentukan preferensi atau urutan dari partai atau calon yang diinginkan.

c. Electrol Formula (jenis-jenis sistem pemilu)

Electrol Formula adalah bagian dari sistem pemilihan umum yang membicarakan penerjemahan suara menjadi kursi. Termasuk di dalamnya adalah rumus yang digunakan untuk menerjemahkan perolehan suara menjadi kursi, serta batas ambang pemilihan.

Tabel di bawah memberikan gambaran ringkas mengenai beberapa jenis sistem pemilihan umum.

TABEL 1.7
JENIS-JENIS SISTEM PEMILU¹⁵

Sistem	Ukuran Distrik	Tipe	Deskripsi
First Past the Post (FPTP)	Tunggal	pluralitas	Kandidat yang memperoleh suara terbanyak yang terpilih, walaupun tidak mencapai mayoritas sederhana.
Sistem Dua Putaran	tunggal	mayoritas	Jika tidak ada kandidat yang mencapai mayoritas sederhana, diadakan pemilihan-pemilihan lanjutan diantara dua kandidat dengan suara terbanyak. Pemenang pemilihan lanjutan yang akan terpilih.
Alternative Vote	tunggal	mayoritas	Pemilih menentukan pilihan sesuai dengan urutan Preferensi. Jika tidak ada calon yang memperoleh suara mayoritas berdasarkan Preferensi pertama, maka calon dengan Preferensi pertama paling sedikit disingkirkan dan didistribusikan sesuai dengan pilihan keduanya. Proses di ulangi sampai ada calon dengan suara mayoritas.
Block vote (BV)	Jamak	pluralitas	Pemilih memberikan pilihan sebanyak jumlah kursi tersedia. Jika tersedia n kursi, maka n orang kandidat dengan suara terbanyak yang terpilih.
Sistem Dua Putaran	Jamak	semi proporsional	Pemilih memberikan satu pilihan. Jika tersedia n kursi, maka n orang kandidat dengan suara terbanyak yang terpilih.
Single Transferable Vote (STV)	Jamak	proporsional	Pemilih menentukan pilihan sesuai dengan preferensi. Kandidat dengan pilihan pertama mencapai quota akan terpilih. Calon dengan preferensi pertama paling sedikit disingkirkan dan didistribusikan sesuai pilihan keduanya. Proses di ulangi sampai di peroleh calon

¹⁵ Khanafi, "peran HMI DIPO cabang yogyakarta dalam pergulatan politik pada pemilu 2009" Skripsi IP UMY 2009 hal 32 lihat juga www.blogspot.com/ Theodore Benjuino, *Sistem Pemilihan Umum : Pemilu Indonesia*. Com 10 April 2010

			yang mencapai quota.
Paralel Vote	campuran	semi proporsional	Legislatur terdiri dari mereka yang terpilih lewat pluralitas atau mayoritas dalam distrik beranggota tunggal di tambah mereka yang terpilih secara proporsional dalam distrik beranggota banyak.
Mixed Member Proporsional (MMP)	campuran	proporsional	Legislatur terdiri dari mereka yang terpilih lewat pluralitas atau mayoritas dalam distrik beranggota tunggal di tambah mereka yang terpilih secara proporsional dalam distrik beranggota banyak. Kursi proporsional di berikan untuk mengkompensi efek disproporsional yang timbul dari hasil distrik beranggota tunggal.
Representasi Proporsional Daftar	Jamak	proporsional	Pemilih memilih dari daftar yang disediakan, kursi diberikan sesuai proporsi suara yang diterima oleh partai. Kandidat terpilih berdasarkan urutannya dalam daftar.

Sumber : www.blogspot.com/ Theodore Benjuino, *Sistem Pemilihan Umum : Pemilu Indonesia*. Com 10 April 2010 dalam Khanafi, "peran HMI DIPO cabang yogyakarta dalam pergulatan politik pada pemilu 2009" Skripsi, IP UMY 2009

Namun dalam memilih sistem pemilu harus memperhatikan implikasi dan berusaha mengantisipasi akibat-akibat dari kompleksitas faktor secara komprehensif. Tidak ada sistem pemilu yang sempurna dan berlaku umum disemua negara. Kunci utama dalam memilih sistem pemilu adalah mengoptimalkan pencapaian tujuan pemilu dan mempersempit akibat negatif pemilu, khususnya konflik kekerasan. Berikut perubahan-perubahan sistem pemilu yang terjadi di Indonesia dari Orde baru hingga pemilu 2009, yaitu :

- 1) Pada masa Orde Baru hingga pemilu 1999 Indonesia menggunakan Sistem Pemilu representasi proporsional daftar tertutup.

- 2) Pada pemilu 2004 Indonesia menggunakan Sistem pemilu representasi proporsional daftar terbuka, dengan penetapan calon terpilih masih dibatasi dengan perolehan suara sebesar BPP (Bilangan Pembagi Pemilih).
- 3) Sedangkan Pada pemilu 2009 Indonesia menggunakan Sistem pemilu representasi proporsional daftar terbuka dengan penetapan calon suara terbanyak

Menurut Afan Gaffar¹⁶, untuk menentukan sistem pemilu yang tepat bagi sebuah negara atau masyarakat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

Electoral formula ini akan menentukan alokasi kursi yang diberikan pada masing-masing partai yang bersaing. Dalam Ilmu Politik secara umum dikenal dua jenis sistem pemilihan, yaitu:

- 1) Sistem Distrik/Sistem Pluralistik (*single-member constituency*) Sistem ini merupakan sistem yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis yang lazim disebut distrik. Setiap distrik, mempunyai satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat.
- 2) Sistem Representasi Proporsional (*multi-member constituency*) Gagasan pokok dalam sistem ini adalah bahwa jumlah kursi yang diperoleh suatu partai sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya.

¹⁶ Afan Gaffar, op.cit., hlm. 255-256.

d. Distric Magnitude (Besaran Kursi Dalam Distrik)

Distric magnitude menentukan jumlah wakil rakyat yang dipilih disetiap distrik. Besaran distrik bisa berbeda-beda tergantung pada kepadatan penduduknya. Semakin besar *magnitude* sebuah distrik, makin besar partai-partai kecil terlindungi.

e. Electoral Threshold,

yaitu jumlah dukungan minimal yang harus diperoleh seorang atau sebuah partai untuk memperoleh kursi di lembaga perwakilan

3. Partai Politik

a. Definisi partai politik

Carl J. Friedrich: "Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil."¹⁷

R.H. Soltau: "Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang – dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih – bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka".¹⁸

Sigmund Neumann: "Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut

¹⁷ Haryanto, *Sistem Politik: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm 161

¹⁸ Ibid., hal 161.

dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda¹⁹

Berdasarkan beberapa definisi mengenai partai politik diatas, maka secara umum partai politik dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang terorganisir serta berusaha untuk mengendalikan pemerintahan agar dapat melaksanakan program-programnya dan menempatkan atau mendudukan anggota-anggotanya dalam jabatan pemerintahan.²⁰ Dalam UU no.2 tahun 2008 tentang Partai Politik pasal 1 disebutkan bahwa:

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945²¹.

¹⁹. Ibid., hal 162.

²⁰ Huszar dan Stevenson dalam Haryanto, ibid., hlm. 87.

²¹ UU no 2 tahun 2008 tentang partai politik,

Maurice Duverger adalah salah satu ilmuwan politik yang mencoba membuat klasifikasi partai politik dan hingga saat ini masih digunakan oleh kalangan ilmuwan politik. Berdasarkan persaingan antar partai yang terjadi dalam sebuah sistem politik, maka klasifikasi partai politik, yang kemudian disebut dengan sistem kepartaian, dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: sistem satu partai, sistem dua partai, dan sistem multi partai.²²

Sebagai suatu organisasi, parpol secara ideal dimaksudkan untuk memobilisasi dan mengaktifkan rakyat, mengatur perbedaan pendapat yang saling bersilang, mewakili kepentingan tertentu, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah dan damai. Peran partai politik didalam negara demokrasi sangat vital karena lembaga inilah yang nantinya melakukan fungsi-fungsi kontrol terhadap pemerintahan melalui wakil-wakilnya yang duduk dilembaga legislatif. Partai politik juga berfungsi melakukan pendidikan politik kepada warga negara supaya dapat ambil bagian dalam kehidupan berdemokrasi.

Partai politik mempunyai cita-cita, tujuan dan aktivitas yang berbeda dari elemen demokrasi lainnya seperti Kelompok Kepentingan (*interest group*) atau Kelompok Penekan (*pressure group*). Partai politik memiliki visi dan misi yang lebih luas. Jika Kelompok Kepentingan hanya berjuang untuk mempengaruhi pembuat kebijakan agar supaya terhindar dari peraturan-peraturan yang merugikan kepentingannya atau supaya diuntungkan dari produk hukum tertentu, maka partai

²² Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hlm. 166-170.

politik lebih mewakili kepentingan dari mayoritas konstituen yang diwakilinya. Kelompok kepentingan juga tidak berusaha menempatkan wakil-wakilnya untuk duduk dikursi wakil rakyat, ia hanya cukup berusaha mempengaruhi satu atau dua pembuat kebijakan entah anggota legislatif atau menteri dalam kabinet. Di lihat dari beberapa indikator diatas maka jelaslah bahwa partai politik mempunyai orientasi yang lebih visioner karena mewakili banyak golongan masyarakat.

Tujuan partai politik ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kekuasaan (biasanya dengan cara-cara konstitusionil) untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.²³

b. Fungsi Partai Politik

Dalam kehidupan kenegaraan fungsi partai politik yang jelas-jelas tampak adalah sebagai sarana rekrutmen politik untuk menduduki jabatan politik seperti menjadi anggota DPR, DPRD, menjadi penguasa daerah seperti Bupati atau Gubernur ataupun menjadi presiden. Sedangkan menurut para ahli fungsi partai politik tidak hanya terbatas pada rekrutmen politik saja.

Menurut Miriam Budiarto fungsi partai politik ada empat yaitu:

1) Sebagai sarana komunikasi politik

Di masyarakat modern yang luas dan kompleks, banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang. Pedapat aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara dipadang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi yang lain yang senada. Proses ini dinamakan

²³. Miriam Budiarto, *Op.Cit.*, hal 160-161.

penggabungan kepentingan (*interest aggregation*). Sesudah digabungkan, pendapat dan aspirasi tadi diolah dan dirumus dalam bentuk yang lebih teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentingan (*interest articulation*).

Setelah itu partai politik merumuskan menjadi usul kebijakan. Usul kebijakan ini di masukkan ke dalam program atau *platform* partai (*goal formulation*) untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (*public policy*).

2) Sebagai sarana sosialisasi politik

Dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berbeda. Dimensi lain dari sosialisasi politik adalah sebagai proses yang melaluinya masyarakat menyampaikan “budaya politik” yaitu norma-norma dan nilai-nilai, dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian sosialisasi politik merupakan faktor penting didalam terbentuknya budaya politik (*political culture*) suatu bangsa.

M. Rush merumuskan defenisi sosialisasi politik sebagai berikut:

Sosialisasi politik adalah proses yang melalui nya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali system politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik.²⁴

²⁴ M. Rush, didalam Miriam Budiarjo .,Op.Cit.,hal. 407

3) Sebagai sarana rekrutmen politik

Rekrutmen politik sangat berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal maupun nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri.

Selain untuk tingkatan seperti itu, partai politik juga berkepentingan memperluas atau memperbanyak keanggotaan. Maka ia pun berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.

4) Sebagai sarana pengatur konflik (*conflict Management*)

Realitas masyarakat yang bersifat heterogen maka potensi konflik selalu muncul, maka disini peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasinya, atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Elite partai dapat menumbuhkan pengertian diantara mereka dan bersamaan dengan itu juga meyakinkan pendukungnya.²⁵

Menurut Markovic partai politik memiliki fungsi, yaitu sebagai berikut:

- a) Artikulasi kebutuhan, kepentingan dan aspirasi berbagai kelompok sosial.

²⁵ Miriam Budiarjo, ..., *ibid.*, hal 405-409

- b) Menggariskan alternatif jangka panjang dan menengah untuk tujuan-tujuan sosial.
- c) Perumusan program untuk mencapai tujuan.
- d) Mengintegrasikan berbagai penduduk kearah tujuan bersama.
- e) Mencarikan pemecahan kompromis konflik antar kebangsaan, ras, agama dan kelas.
- f) Rekrutmen dan pemilihan pemimpin dan fungsionaris politik yang berbakat.
- g) Pengorganisasian kampanye pemilihan umum untuk mewakili kelompok soaial yang ada.
- h) kontrol dan kritik terhadap pemerintah.²⁶

Realitas politik di Indonesia saat ini, partai politik belum mampu melaksanakan fungsi-fungsinya secara maksimal dan sepenuhnya seperti idealnya fungsi partai politik. Seperti pendidikan politik, partai politik hanya sebagai wahana sekaligus praktek pembodohan masyarakat, yang pada koridornya masyarakat mempunyai kedaulatan didalam sistem demokrasi hanya menjadi obyek kekuasaan politik belaka. Sehingga dapat dikatakan bahwa yang mempunyai kedaulatan adalah para elite politik, keinginan para elite politik seolah-olah dipandang keinginan masyarakat.

²⁶ Markovic didalam M. Rusli Karim, *pemilu demokratis Kompetitif* (Tiara Wacana Yogyakarta, 1991) hal. 9

Jauh lagi dari harapan adalah fungsi partai politik sebagai sarana pengatur konflik, adanya perbedaan dan kepentingan dalam masyarakat tidak dapat secara bijak didengarrkan dan cermat dirumuskan hingga kemudian dipecahkan oleh wakil partai politik di parlemen.

Masyarakat akan menigkat kepercayaannya apabila patai politik secara maksimal dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Sehingga kahadiran partai politik memang menjadi sebuah wahana didalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sekaligus menuju pada tujuan negara yang dicita-citakan bersama.

c. Sistem Kepartaian

Menurut Maurice Duverger dalam bukunya Political Parties demikian juga dengan G.A Jacobsen dan M.H Lipman dalam bukunya Political Science mengklasifikasikan system kepartaian kedalam tiga macam system, yaitu:

1) Sistem partai tunggal (one party system).

partai politik merupakan alat pemerintahan dari perhimpunan sukarela pada pemilih, sistem partai tunggal meliputi baik negara yang benar-benar hanya mempunyai satu partai di samping itu juga negara dimana ada satu partai yang dominan. Dalam negara dengan partai tunggal, keadaan kepartaian negara dalam tersebut dapat dinamakan tidak bersaing atau non kompetitif, disebabkan karena partai-partai yang ada dalam negara harus menerima pimpinan dari partai yang dominan serta tidak dibenarkan untuk bersaing secara bebas dan terbuka.

2) Sistem dua partai (two party system)

Di negara tersebut ada dua partai atau lebih dari dua partai, akan tetapi yang memegang peranan dominan hanyalah dua partai, partai di bagi menjadi dua yaitu partai besar yang berkuasa, karena menang dalam pemilihan umum dinamakan mayoritas party, partai ini memegang tanggung jawab untuk urusan-urusan umum. Sedangkan lainnya dinamakan minoritas party atau partai oposisi karena kalah dalam pemilihan umum. Partai oposisi mempunyai tugas untuk memeriksa dengan teliti dan mengkritik politik pemerintah.

3) sistem multi partai (multy party system)

Dalam negara tersebut ada beberapa partai yang hampir sama kekuatannya. Masing-masing partai mempertahankan suatu politik tertentu tentang satu atau sejumlah persoalan-persoalan yang penting. Suatu negara dengan sistem multi partai masing-masing pemilih partai mendukung partai yang hampir sesuai dan mewakili pendukungnya sendiri.²⁷

d. Karakteristik Partai Politik

Maurice Duverger didalam bukunya *political parties*, mengatakan bahwa mencapai perbedaan karakteristik partai-partai politik guna menangkap pengertian

²⁷Maurice Duverger, G.A. Jacobson dan M.H. Lipman, di dalam Soelistyati Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politik*, (Galia Indonesia, Yogyakarta, 1984), hal. 114-115

atau konsep partai politik itu sendiri, bias dikatakan dengan melihat struktur dan anatomi masing-masing partai politik.

Untuk mencapai karakteristik partai-partai politik bias dilakukan dengan meninjau segi organisasi, keanggotaan ataupun aspek kepemimpinannya. Dengan ini Duverger mencoba mengklasifikasikan partai-partai politik berdasarkan direct structure dan indirect structure.

1) Direct Structure

keanggotaan seseorang dalam partai politik dilihat sebagai individu-individu yang secara langsung masuk dan mengikutkan diri dalam partai politik tertentu.

2) indirect structure

keanggotaan seseorang dalam partai politik diperoleh berdasarkan keikutsertaan dalam organisasi yang terikat kepada suatu partai politik tertentu, karena adanya kepentingan timbal balik.²⁸

4. Relasi Partai Politik Dengan Pemilu

Keberadaan dan pengakuan terhadap partai-partai politik sebagai peserta pemilu merupakan salah satu indikator adanya proses demokrasi yang sehat dalam sebuah tatanan sistem politik. Melalui pemilu, partai-partai politik berusaha mendapatkan dukungan suara rakyat untuk dapat mendudukkan kader-kadernya dalam jabatan pemerintahan, sehingga partai politik tersebut dapat menjalankan

²⁸ Maurice Duverger, didalam Cheppy Haricahyono, *ilmu politik dan perspektifnya* (Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991),hal 193

programnya atau secara signifikan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan yang ada.

Selain itu, kehadiran partai politik memiliki peran yang penting karena berkaitan dengan fungsi-fungsi yang dijalankannya dalam sistem politik. Fungsi-fungsi itu bisa diidentifikasi sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan, rekrutmen politik, komunikasi politik, sosialisasi politik, pengatur konflik, dan pembuat kebijakan ²⁹.

a. Factor yang mempengaruhi perolehan suara partai politik dalam sebuah pemilu

Begitu banyak faktor yang dapat mempengaruhi perolehan suara suatu partai politik dalam pemilu, salah satu diantaranya yaitu, perilaku pemilih. Akan tetapi ada sekelompok orang yang terkadang memilih karena partai atau kandidat tertentu dianggap representatif dari kelas sosialnya dan ada juga suatu kelompok yang memilih sebagai ekspresi dari sikap loyal pada partai atau figure tokoh tertentu.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan politik sangat diperlukan dalam menyusun strategi *marketing*. Informasi mengenai faktor-faktor tersebut dapat berguna untuk menyusun strategi komunikasi, manajemen kandidat, dan penyusunan isu dan kebijakan yang akan ditawarkan kepada para pemilih.

²⁹ Haryanto, *Sistem Politik: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 89-96. Lihat juga dalam Miriam Budiadjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hlm: 163-165. Miriam menyebutkan 4 fungsi utama yang dijalankan oleh Partai Politik, yaitu: sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana rekrutmen politik, dan sebagai sarana pengatur konflik.

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan politik seseorang, yang terpenting dan sangat berpengaruh pada perolehan suara parpol dalam pemilu adalah perilaku politik masyarakat sebagai peserta pemilu. Efektifitas dan efisiensi penyampaian pesan politik – apa dan dengan cara bagaimana pesan disampaikan – ditentukan oleh pemahaman perilaku politik. Siapa, kapan, dan bagaimana seorang kandidat tampil agar dapat menarik massa, juga ditentukan perilaku pemilih. Pendekatan, perilaku pemilih menjadi informasi penting yang sangat berguna dalam merencanakan kampanye dan alokasi sumberdaya yang dimiliki seorang kandidat atau sebuah partai.

b. Berikut ada beberapa pendekatan untuk melihat perilaku pemilih;³⁰

1) Pendekatan Sosiologis (Mazhab Columbia)

Pendekatan sosiologis berasal dari Eropa, kemudian dikembangkan oleh para sosiolog Amerika Serikat di Universitas Columbia. Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial, seperti usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, latar belakang keluarga, kegiatan-kegiatan dalam kelompok formal dan informal, dan lainnya, memberi pengaruh cukup signifikan terhadap pembentukan perilaku pemilih. Kelompok-kelompok sosial itu memiliki peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi, dan orientasi seseorang.

³⁰ Adnan Nursal, 2004. *Political Marketing*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 54-71

2) Pendekatan Psikologis (Mazhab Michigan)

Pendekatan ini dipelopori oleh August Campbell, peneliti pada *Survey Research Center*, sebuah lembaga penelitian di Universitas Michigan, kemudian dikembangkan di Amerika Serikat. Pendekatan ini menggaris bawahi adanya sikap politik para pemberi suara yang menetap. Teori ini dilandasi oleh konsep *sikap* dan *sosialisasi*.

Sikap seseorang sangat mempengaruhi perilaku politiknya. Sikap itu terbentuk melalui sosialisasi yang berlangsung lama, bahkan bisa jadi sejak seorang calon pemilih masih berusia dini. Pada usia dini, seorang calon pemilih telah menerima "pengaruh" politik dari orang tuanya, baik dari komunikasi langsung maupun dari pandangan politik yang diekspresikan oleh orang tuanya. Sikap tersebut menjadi lebih mantap ketika menghadapi pengaruh berbagai kelompok acuan seperti pekerjaan, kelompok pengajian, dan sebagainya. Proses panjang sosialisasi itu kemudian membentuk ikatan yang kuat dengan partai politik atau organisasi kemasyarakatan lainnya. Ikatan inilah yang disebut sebagai *identifikasi partai*, sebuah variabel inti untuk menjelaskan pemilih berdasarkan Mazhab Michigan

3) Pendekatan Rasional

Perilaku pemilih dapat berubah kapan saja, dalam artian bahwa perilaku pemilih tidak hanya ditentukan oleh faktor karakteristik sosial dan identifikasi partai saja. Sebagai bukti, kita dapat melihat perilaku pemilih di Inggris yang menunjukkan adanya peluang untuk mempengaruhi pemilih di luar "jalur"

karakteristik sosial dan identifikasi. Kavanagh mengemukakan, perilaku pemilih Inggris lebih sulit diprediksi karena tiga alasan;³¹

- a) Menurunnya jumlah orang yang mengidentifikasi diri mereka secara kuat dengan partai-partai.
- b) Loyalis kelas melemah, dan kelas pekerja berkurang jumlahnya.
- c) Terjadi perubahan sosial, yang antara lain ditandai dengan perubahan pekerjaan dan pemukiman.

Dengan tiga faktor tersebut, dukungan para pemilih kepada partai-partai bersifat 'mudah menguap' (volatil). Survei jejak pendapat membuktikan, *rating* dukungan kepada suatu partai pada awal pekan kampanye bisa berubah secara signifikan pada akhir pekan. Ini mengindikasikan kampanye memberikan andil dalam perilaku pemilih. *Pilihan isu* yang merupakan "mainan" utama juru kampanye tak bisa diabaikan.

Hanya saja, pilihan isu politik tidak serta merta menjadi daya pikat kuat dan satu-satunya faktor yang mustahak. Satu dan lain hal ialah karena adanya skeptisisme tentang kemampuan para kandidat untuk menghela dan mewujudkan isu dalam agenda pemerintahan bila kelak terpilih. Walhasil, "pesona" kandidat juga menjadi faktor penting dalam menentukan perilaku pemilih.

³¹ Ibid, hlm. 62.

4) Pendekatan Domain Kognitif (Pendekatan Marketing).

Newman & Sheth (1985) mengembangkan model perilaku pemilih berdasarkan beberapa domain yang terkait dengan *marketing*. Dalam mengembangkan model tersebut, mereka menggunakan sejumlah kepercayaan kognitif yang berasal dari berbagai sumber seperti pemilih, komunikasi dari mulut ke mulut, dan media massa. Model ini dikembangkan untuk menerangkan dan memprediksikan perilaku pemilih.

Menurut model ini, perilaku pemilih ditentukan oleh tujuh domain kognitif yang berbeda dan terpisah, sebagai berikut:

- a) Isu dan kebijakan politik (*issue and policies*); merepresentasikan kebijakan atau program yang diperjuangkan dan dijanjikan oleh partai atau kandidat politik jika kelak menang pemilu. Inilah platform dasar yang ditawarkan oleh kontestan Pemilu kepada para pemilih. Yang termasuk dalam komponen ini adalah kebijakan ekonomi, kebijakan luar negeri, kebijakan dalam negeri, kebijakan sosial, kebijakan politik dan keamanan, kebijakan hukum, dan karakteristik kepemimpinan.
- b) Citra sosial (*social imagery*); menunjukkan stereotip kandidat atau partai untuk menarik pemilih dengan menciptakan asosiasi antara kandidat atau partai dengan segmen-segmen tertentu dalam masyarakat. *Social imagery* adalah citra kandidat dalam pikiran pemilih mengenai "berada" di dalam kelompok sosial mana atau tergolong sebagai apa sebuah partai atau

kandidat politik. *Social imagery* dapat terjadi berdasarkan banyak faktor, antara lain:

i. Demografi:

- Usia (contoh: *partai orang muda*)
- Gender (contoh: *calon pemimpin bangsa dari kaum hawa*)
- Agama (contoh: *partai orang Islam, partai orang Katolik*)

ii. Sosio ekonomi:

- Pekerjaan (contoh: *partai kaum buruh*)
- Pendapatan (contoh: *partai wong cilik*)

iii. Kultural dan etnik:

- Kultural (contoh: *kandidat presiden yang seniman*)
- Etnik (contoh: *partai orang jawa*)

iv. Politis-ideologi (contoh: *partai nasionalis, partai agamis, partai konservatif, partai moderat*).

c) Perasaan Emosional (*emotional feeling*); dimensi emosional yang terpancar dari sebuah kontestan atau kandidat yang ditunjukkan oleh *policy* politik yang ditawarkan.

d) Citra kandidat (*candidate personality*); mengacu pada sifat-sifat pribadi yang penting yang dianggap sebagai karakter kandidat. Pada Pemilu Amerika tahun 1980, misalnya, Reagan memiliki citra sebagai "pemimpin yang kuat", sementara John Glen pada tahun 1984 mencoba mengembangkan citra sebagai "seorang pahlawan". Beberapa sifat yang

juga merupakan *candidate personality* adalah artikulatif, welas-asih, stabil, energik, jujur, tegar, dan sebagainya.

- e) Peristiwa mutakhir (*current events*); mengacu pada himpunan peristiwa, isu, dan kebijakan yang berkembang menjelang dan selama kampanye. Secara umum, *current events* dapat dibagi menjadi masalah domestik dan luar negeri. Yang termasuk dalam masalah domestik misalnya adalah tingkat inflasi, prediksi ekonomi, gerakan sparatis, ancaman keamanan, merajalelanya korupsi, dan sebagainya. Sedangkan masalah luar negeri misalnya perang antara negara-negara tetangga, invasi sebuah negara ke negara lainnya, dan contoh lainnya yang mempunyai pengaruh baik langsung maupun tidak langsung kepada para pemilih.
- f) Peristiwa pribadi (*personal events*); mengacu pada kehidupan pribadi dan peristiwa yang pernah dialami secara pribadi oleh seorang kandidat misalnya skandal seksual, skandal bisnis, menjadi korban rezim tertentu, menjadi tokoh pada perjuangan tertentu, ikut berperang untuk mempertahankan tanah, dan sebagainya.
- g) Faktor-faktor efistemik (*epistemic issues*); isu-isu pemilihan yang spesifik yang dapat memicu keingintahuan para pemilih mengenai hal-hal baru. Carter pada pemilihan Presiden Amerika tahun 1976 berhasil menunjukkan dirinya sebagai "wajah segar" pada dunia politik. Pada Pemilu Amerika tahun 1992, Ross Perot sempat muncul sebagai pesaing George Bush dan Bill Clinton. Bagi sebagian pemilih Ross Perot

merepresentasikan seorang kandidat di luar *mainstream* dan terlihat sebagai seorang yang akan melakukan sesuatu yang berbeda dan unik dari tradisi politik. *Epistemic issues* ini sangat mungkin muncul di tengah-tengah ketidakpercayaan publik kepada institusi-institusi politik yang menjadi bagian dari sistem yang berjalan.

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Pemilih Yang Mempengaruhi Perolehan Suara Parpol Dalam Pemilu

Pada dasarnya keempat pendekatan perilaku pemilih tersebut diatas saling menguatkan atau melengkapi satu sama lainnya. Untuk memudahkan kepentingan praktis, kita dapat menyederhanakan keempat pendekatan itu menjadi sebuah rangkuman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih yang mempengaruhi perolehan suara parpol dalam pemilu, yaitu:³²

1. Social imagery atau citra sosial (pengelompokan sosial)
2. Identifikasi partai
3. Kandidat:
 - a. *Emotional feeling*
 - b. *Candidate personality*
4. Isu dan kebijakan politik (*issues and policies*)
5. Peristiwa-peristiwa tertentu:
 - a. Peristiwa mutakhir (*current events*)

³² Ibid, hlm. 70.

b. Peristiwa personal (*personal events*)

6. Faktor-faktor epistemik (*epistemic issues*).

Berbeda dengan konteks yang terjadi di Indonesia selama tiga dekade kepemimpinan yang ada (orde lama, orde baru, dan reformasi). Perilaku pemilih dalam pemilu lebih terlihat secara murni ketika reformasi bergulir pada tahun 1998 untuk pemilu 1999. Karena, menurut Menurut William Liddle (1998), sebelum era reformasi, demokrasi hanya berkembang selama tujuh tahun (1949-1956). Afan Gaffar (1992) menyatakan proses politik di bawah Orde Baru bukanlah demokrasi, karena pemilu hanya bertujuan memperoleh legitimasi pemerintah untuk menata irama politik dan ekonomi. Sementara itu, menurut Irwan dan Endriana (1995), beberapa pelaksanaan Pemilu ditandai dengan terjadinya penyimpangan sehingga asas langsung, umum, bebas, dan rahasia tidak berjalan sebagaimana mestinya, hingga boleh disebut tidak memenuhi syarat demokrasi.

Setelah reformasi bergulir, keadaanpun menjadi berubah. Salah satu perubahan tersebut ditunjukkan pada saat Pemilu 1999 dengan terlahirnya 48 parpol yang mengikuti pemilu dan partai-partai pun bebas menentukan platform politiknya masing-masing. Seiring dengan hal tersebut, terjadi pula perubahan perilaku komunikasi massa dan komunikasi interpersonal yang jauh lebih bebas dibandingkan sebelumnya.

Ada tiga masalah dalam menciptakan peta umum perilaku pemilih Indonesia pasca Orde Baru yang nantinya akan berguna untuk menyusun strategi *marketing* dalam memenangkan pemilu, baik ditingkat legislatif maupun eksekutif. Ketiga masalah tersebut, diantaranya;³³

- 1) Iklim sosial politik dewasa ini sangat berbeda dengan sebelumnya. Dengan demikian, kita tidak bisa begitu saja berasumsi bahwa pola perilaku saat ini identik dengan masa silam.
- 2) Indonesia memiliki wilayah geografis yang luas dan majemuknya faktor sosio kultural, sosio ekonomi, tingkat pendidikan, dan tingkat modernisasi. Dengan kondisi seperti itu, cukup sulit membuat model perilaku umum, terlebih karena terbatasnya jumlah penelitian yang dilakukan.
- 3) Berbagai studi yang ada baru menghasilkan kesimpulan yang terlalu "kasar" sehingga perlu dirinci lebih detail agar dapat diterapkan untuk menyusun strategi pemasaran.

Sedangkan perilaku pemilih Indonesia pada pemilu sebelum reformasi atau bisa dikatakan pada masa silam, lebih berorientasi pada;

- 1) Orientasi Agama

³³ Ibid. hlm. 78.

- 2) Faktor Kelas Sosial dan Kelompok Sosial Lainnya; Menurut Affan Gafar, ada empat faktor penyebab ketidak munculan faktor kelas dipedesaan jawa, yaitu;
 - a. Sifat sistem ekonomi (agraris subsisten) tidak memungkinkan kesadaran massa berdasarkan kelas.
 - b. Setelah penghapusan PKI dan pengebiran partai politik, penduduk desa terdepolitisasi.
 - c. Adanya trauma kup G-30 S. Ribuan anggota partai komunis dibunuh, termasuk anggota Barisan Tani Indonesia di pedesaan Jawa.
 - d. Pemerintahan orba yang tak henti-hentinya menjelaskan bahwa individu maupun organisasi tidak diizinkan menonjolkan antagonisme dari perbedaan agama, ras, dan kelas.
- 3) Faktor Kepemimpinan dan Ketokohan
- 4) Faktor Identifikasi
- 5) Orientasi Isu
- 6) Orientasi Kandidat
- 7) Kaitan dengan Peristiwa
- 8) Rekonfigurasi Papan Catur Politik.

4. Konflik Politik Kepartaian Dan Manajemen Konflik

a. Definisi konflik

berasal dari kata kerja latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya³⁴

Ada beberapa pengertian konflik menurut beberapa ahli³⁵

- 1) *Menurut Gibson*, hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing – masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri – sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain
- 2) *Menurut Minnery* Konflik organisasi merupakan interaksi antara dua atau lebih pihak yang satu sama lain berhubungan dan saling tergantung, namun terpisahkan oleh perbedaan tujuan
- 3) *Menurut Robbin* keberadaan konflik dalam organisasi dalam organisasi ditentukan oleh persepsi individu atau kelompok. Jika mereka tidak menyadari adanya konflik di dalam organisasi maka secara umum konflik tersebut dianggap tidak ada. Sebaliknya, jika mereka mempersepsikan bahwa

³⁴ Lihat <http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik>

³⁵ Lihat juga http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik#Definisi_konflik

di dalam organisasi telah ada konflik maka konflik tersebut telah menjadi kenyataan

Robbin mengatakan konflik dalam organisasi disebut sebagai The Conflict Paradoks, yaitu pandangan bahwa di sisi konflik dianggap dapat meningkatkan kinerja kelompok, tetapi di sisi lain kebanyakan kelompok dan organisasi berusaha untuk meminimalisasikan konflik. Pandangan ini dibagi menjadi tiga bagian, antara lain³⁶:

1. Pandangan tradisional (The Traditional View). Pandangan ini menyatakan bahwa konflik itu hal yang buruk, sesuatu yang negatif, merugikan, dan harus dihindari. Konflik disinonimkan dengan istilah violence, destruction, dan irrationality. Konflik ini merupakan suatu hasil disfungsional akibat komunikasi yang buruk, kurang kepercayaan, keterbukaan di antara orang – orang, dan kegagalan manajer untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi karyawan.³⁷
2. Pandangan hubungan manusia (The Human Relation View. Pandangan ini menyatakan bahwa konflik dianggap sebagai suatu peristiwa yang wajar terjadi di dalam kelompok atau organisasi. Konflik dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari karena di dalam kelompok atau organisasi pasti terjadi perbedaan pandangan atau pendapat antar anggota. Oleh karena itu,

³⁶ Lihat juga http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik#Definisi_konflik

³⁷ Ibid.

konflik harus dijadikan sebagai suatu hal yang bermanfaat guna mendorong peningkatan kinerja organisasi. Dengan kata lain, konflik harus dijadikan sebagai motivasi untuk melakukan inovasi atau perubahan di dalam tubuh kelompok atau organisasi³⁸.

3. Pandangan interaksionis (The Interactionist View). Pandangan ini cenderung mendorong suatu kelompok atau organisasi terjadinya konflik. Hal ini disebabkan suatu organisasi yang kooperatif, tenang, damai, dan serasi cenderung menjadi statis, apatis, tidak aspiratif, dan tidak inovatif. Oleh karena itu, menurut pandangan ini, konflik perlu dipertahankan pada tingkat minimum secara berkelanjutan sehingga tiap anggota di dalam kelompok tersebut tetap semangat, kritis – diri, dan kreatif.³⁹

b. Realitas Partai Dan Konflik⁴⁰

Sebuah Organisasi yang berdiri dengan *platform* abadi bergerak dalam wilayah politik, dan didalamnya merupakan akumulasi dari kepentingan-kepentingan kelompok pada komunitas adalah “rumah” dari sebuah partai politik karena sejak semula “disengaja” bahwa sebuah partai politik didirikan adalah untuk mencapai tujuan bersama yaitu berupa kepentingan, meraih kekuasaan, merebut sumber-sumber

³⁸ Ibid,

³⁹ Ibid,.

⁴⁰ Nahrawi, imam, *moralitas politik PKB, Aktualisasi PKB sebagai partai kerja, partai nasional dan partai modern*, Averroes press, MALANG, 2005 Hal.49

daya ekonomi, maka rawan akan hadirnya benturan kepentingan di internal organisasi tersebut⁴¹.

Adalah keniscayaan bahwa dinamika suatu organisasi yang berwujud partai politik tidak akan pernah mampu lari dari kehadiran konflik internal maupun eksternal. Meskipun sebuah organisasi selalu bertujuan untuk mencapai tujuan bersama (*target group*) namun dalam partai politik justru yang sering muncul adalah kepentingan-kepentingan yang tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan-perbedaan yang tajam dan bahkan bersebrangan. Agregasi dari perbedaan ini mengalami internalisasi, dan diseminasi maka selanjutnya melahirkan sebuah konflik yang tajam dan dalam pula.

Apabila kita menganalisis Pengertian partai politik menurut Menurut Carl J. Friedrich: "Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideil maupun materiil" dan pengertian partai politik menurut sigmund dan neumann adalah organisasi dari aktivitas politik yang berusaha untuk memerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar perjuangan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda⁴².

⁴¹ Ibid., Hal 50.

⁴² Ibid., hal 51

Dari perspektif teoritik yang menyajikan dua pengertian tentang definisi partai politik di atas maka semakin meyakinkan kita bahwa dalam suatu partai politik memang rawan untuk terjadinya suatu partai politik memang rawan untuk terjadinya suatu konflik, akan terjadi banyak hal yang akan saling bergesekan baik mengenai ideologi, nilai nilai dasar dan prinsip, kelompok/golongan, faksi faksi, dan yang lainnya yang ada dalam satu partai.

c. Konflik Politik Dalam Persepektif Teoritik⁴³

Konflik yang terjadi pada suatu partai politik merupakan konflik yang terjadi dalam suatu organisasi / lembaga dan hal ini lebih banyak merupakan permasalahan internal. Seperti lazimnya dalam suatu organisaisi maka di situ berkumpul individu-individu yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan aturan yang mereka sepakati. Karena dalam suatu organisasi terdapat suatu setruktur-setruktur dengan hirarki tertentu, dan dengan hirarki ini maka terbentuk elit organisasi dan anggota biasa. Hubungan antara elit dan elit lainnya, elit dan anggota memungkinkan munculnya konflik juga.

Konflik menyebabkan terjadinya interaksi pada tataran yang lebih serius dari sekedar kompetisi. Meskipun, sebagaimana yang dinyatakan Schelling, konflik, kompetisi dan kerjasama (*cooperation*) pada dasarnya saling berkaitan, konflik terjadi manakala tujuan, kebutuhan dan nilai-nilai kelompok-kelompok yang bersaing

⁴³ Ibid., Hal 53-54

bertabrakan dan akibatnya terjadilah agresi, walaupun belum tentu berbentuk kekerasan (Schelling 1960; Fafit, 2003)

Konflik politik dalam persepektif teoritik di bedakan menjadi dua⁴⁴:

1) Teori Konflik Mikro :

Diantara asumsi-asumsi kaum behavioris yang paling penting adalah keyakinan bahwa akar penyebab perang itu terletak pada sifat dan perilaku manusia dan keyakinan bahwa ada hubungan yang erat antara konflik intrapersonal dan konflik yang merambah tata sosial eksternal. Penganut aliran ini berusaha mengukuhkan apakah manusia memiliki karakteristik biologis atau psikologis yang akan membuat kita cenderung kearah agresi atau konflik. Mereka juga berusaha menyelidiki hubungan antara individu dan keberadaannya di lingkungannya. mereka ingin memperhitungkan kemungkinan, dengan cara berpikir induktif, variabel-variabel khusus mengenai konflik intrapersonal dan generalisasi mengenai konflik interpersonal. (antar individu) dan internasional (antar bangsa).

2) Teori Konflik Makro

Teori makro memusatkan perhatian pada interaksi kelompok-kelompok, terutama pada tataran sadar. Para ahli teori politik awal, dari Thucidydes dan Sun Tsu sampai Machiavelli dan Von Clausewitz, telah memilih satu unsur tertentu sebagai pusat perhatian: kekuasaan. Memakai dan menjalankan kekuasaan adalah konsep

⁴⁴ Ibid., Hal.54 - 55

utama teori konflik makro. Para ahli teori makro sependapat bahwa kekuasaan itu datang dalam berbagai bentuk: ekonomi, politik, militer, bahkan budaya. Asumsi umum makro atau teori klasik adalah bahwa akar konflik berasal dari persaingan kelompok dan pengejaran kekuasaan dan sumber-sumber. Asumsi-asumsi ini bersumber pada faktor-faktor motivasi sadar dalam lingkungan yang berorientasi material. Teori klasik menggunakan pengamatan-pengamatan fenomena kelompok pada suatu peristiwa untuk mempelajari masalahnya secara mendalam, dan menentukan pentingnya dan hubungan-hubungan banyak variabel ketimbang hanya menggunakan segelintir variabel untuk banyak kasus. Metodologi utama yang digunakan adalah pendekatan historis atau studi kasus.

d. Pendekatan institusional baru (New Institutionalism)

Studi partai politik ini menggunakan pendekatan new institutionalisme (institusionalisme baru) pendekatan Pendekatan new institusionalisme merupakan penyimpangan dari institusionalisme lama, yang mengupas lembaga-lembaga kenegaraan (aparatur negara) seperti apa adanya secara statis. Berbeda dengan itu, institusionalisme baru melihat institusi negara sebagai hal yang dapat diperbaiki kearah suatu tujuan tertentu, seperti misalnya membangun masyarakat yang lebih makmur. Usaha itu perlu ada semacam rencana atau design yang secara praktis menentukan langkah-langkah untuk tercapai tujuan itu.

Pendekatan institusionalisme baru menjelaskan bagaimana institusi itu, apa tanggung jawab dari setiap peran dan institusi beraksi. Apakah institusi politik? ada semacam konsensus bahwa inti dari institusi politik adalah *rule of the game* (aturan

main). Yang menjadi masalah ialah aturan yang mana, dan bagaimana sifatnya, formal seperti perundang-undangan, atau informal seperti kebiasaan, norma sosial atau kebudayaan.

e. Manajemen Konflik

Definisi Manajemen Konflik adalah Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi (termasuk tingkah laku) dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan (*interests*) dan interpretasi.⁴⁵

Fisher menggunakan istilah transformasi konflik secara lebih umum dalam menggambarkan situasi secara keseluruhan⁴⁶.

- 1) Pencegahan Konflik, bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras.
- 2) Penyelesaian Konflik, bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui persetujuan damai.
- 3) Pengelolaan Konflik, bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat.
- 4) Resolusi Konflik, menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan.

⁴⁵ <http://jepits.wordpress.com/2007/12/19/manajemen-konflik-definisi-dan-teori-teori-konflik/>

⁴⁶ Ibid.,

- 5) Transformasi Konflik, mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.

Tahapan-tahapan diatas merupakan satu kesatuan yang harus dilakukan dalam mengelola konflik. Sehingga masing-masing tahap akan melibatkan tahap sebelumnya misalnya pengelolaan konflik akan mencakup pencegahan dan penyelesaian konflik.

Sekalipun beberapa konflik yang terjadi bermanfaat bagi kemajuan, akan tetapi konflik yang sering terjadi muncul kepermukaan merupakan disfungsional. konflik yang seperti ini dapat menurunkan kohesivitas, menimbulkan ketidak puasan, meningkatkan ketegangan.

f. Resolusi Konflik

Definisi resolusi konflik menurut burton adalah menghentikan konflik dengan cara cara analitik yang masuk kearah permasalahan. Resolusi konflik, berbeda dengan sekedar manajemen atau settlement mengacu pada hasil yang dalam pandangan pihak pihak yang terlibat merupakan resolusi permanen terhadap suatu permasalahan.⁴⁷

Dengan menerima asumsi dan hipotesa teori kebutuhan manusia, burton menyatakan bahwa perlu adanya pergeseran paradigma dari politik kekuasaan menuju realitas kekuasaan individu dengan kata lain individu-individu sebagai anggota kelompok-kelompok identitasnya, akan memperjuangkan kebutuhannya di dalam

⁴⁷ Op.Cit.,Hal. 72

lingkungan sendiri. Jika usaha mereka di halang halangi oleh kelompok elit, kelompok identitas lain, lembaga-lembaga dan segala bentuk wewenang/otoritas lainnya, maka tak terelakan lagi akan terjadi konflik. Satu satunya solusi adalah kelompok-kelompok itu menyelesaikan masalahnya sendiri secara analitis, di dukung oleh pihak ketiga yang bertindak sebagai fasilitator dan *bukan* penguasa.

Jika partisipasikan konflik itu dapat mulai mengenal konfliknya sebagai kerusakan hubungan, dan ada persamaan mendasar antara yang bertikai, maka proses abtraksi akan meningkatkan keobjektifanya. Tujuan proses ini adalah untuk memungkinkan partisipan konflik memahami bahwa *semua partisipan mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang sah yang harus di penuhi* untuk menyelesaikan konflik itu. Kunci lainnya di sini adalah mengembangkan proses analitis untuk memudahkan perubahan-perubahan yang di perlukan untuk menciptakan sistem politik dan sosial yang dapat memenuhi kebutuhan itu.

F. Definisi Konsepsional.

1. **Pemilu (Pemilihan Umum):** Pemilihan wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam jabatan politik yang dilaksanakan secara teratur, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. **Partai Politik:** Sebuah organisasi yang terdiri dari beberapa aktivis yang mempunyai orientasi dan cita-cita yang kurang lebih sama dan bertujuan

untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan ideologi partainya melalui cara-cara konstitusional.

3. **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)** Didirikan oleh tokoh-tokoh utama Nahdatul Ulama (NU) seperti K. H Abdurahman Wahid (Gusdur), Kyai Musafa Bisri, Kyai Hasim Muzadi, Kyai Ilyas Ruschiyad, dan lainnya, PKB dideklarasikan di kediaman ketua umum PBNU K.H Abdurahman Wahid, Pada tanggal 23 juli 1998 di Ciganjur, Jakarta Selatan, Seperti dikatakan ketua umum PBNU Abdurahman Wahid pada pendeklarasiannya, PKB ditujukan untuk menjawab dua permasalahan agar *“NU tidak berpolitik praktis seperti digariskan pada muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo, Jawa Timur dan sekaligus memberi wadah bagi aspirasi politik setiap 40 juta warga NU”*⁴⁸.

G. Definisi Operasional

Dalam penulisan definisi oprasional ini penulis bermaksud melakukan pembatasan-pembatasan cakupan penelitian “faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penurunan suara partai kebangkitan bangsa (PKB) study kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pemilu 2009” Setelah penulis melakukan penelitian pra survei ada dua faktor yang menjadi penyebab penurunan suara PKB⁴⁹

⁴⁸ Hamad, Ibnu . *Konstruksi realitas politik dalam media massa: sebuah study critical disourse analysis terhadap berita –berita politik* ; pengantar prof. DR. harsono suwardi MA – edisi 1. jakarta: granit 2004 hal 100-101

⁴⁹ Hasil diskusi dan wawancara bersama sekretaris DPW PKB provinsi yogyakarta (sukoyo-cp 08122702653), ketua dan sekretaris organ kepemudaan PKB(garda bangsa)-yuniono budi S. dan astopo di kantor DPW PKB pada 25 november 2009

1. Faktor Eksternal

- a. Faktor popularitas SBY dan kemenangan Demokrat
- b. Pragmatis Perilaku pemilih
- c. Perubahan UU Pemilu 2009 dari UU pemilu No12 Thn 2003, menjadi UU No 10 thn 2008

2. Faktor Internal

- a. Konflik di dalam internal PKB.
- b. Eksodus besar-besaran para tokoh PKB Ke PKNU dan beberapa partai lain.

H. Metode Penelitian

1. Metode penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *kualitatif deskriptif*. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diamati⁵⁰.

Pemahaman serupa juga diungkapkan oleh Hadari Nawawi⁵¹ yang menyatakan bahwa penelitian deskriptif pada dasarnya digunakan untuk menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek dan atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.

⁵⁰ Lexy Moloeng, 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm.3.

⁵¹ Hadari Nawawi, 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 63.

2. Organisasi Penelitian

Organisasi penelitian yang di jadikan sebagai tempat penelitian guna mendapatkan data primer dan sekunder adalah sebagai berikut

- a. Kantor DPW PKB DIY yang beralamatkan di Jln. Sukonandi no 15 yogyakarta. Telp/fax 0274-513574
- b. Kantor DPW PKNU DIY yang beralamatkan di jln gambiran.Yogyakarta (sebelah pom bensin) dan saat ini telah beralih fungsi menjadi menjadi kantor sebuah LSM
- c. Kantor KPUD DIY yang beralamatkan di jalan Ipda tut harsono no 47 yogyakarta ph. 027455800 fax.0274 558006. Website : kpud-diyprov.go.id e-mail : humas@kpud-diyprov.go.id
- d. Beberapa tempat kos dan pesantren yang memang di kenal penulis sebagai daerah basis masa PKB dan warga nahdiyin seperti di ponpes KRAPYAK dan ponpes WAHID HASYIM Yogyakarta, kos-kosan sekitarnya dan rumah penduduk yang oleh penulis dikenal sebagai konstituen PKB

3. Unit Analisa

Unit analisa dalam penelitian ini adalah partai politik sebagai sebuah institusi politik, dalam hal ini DPW PKB DIY para pengurus maupun kader PKB dan juga para kader yang telah keluar dari PKB ke partai lain seperti PKNU DIY maupun kader-kader NU non partai yang menjadi sumber data dalam penelitian ini melalui

wawancara langsung (interview) dan DPW PKB DIY sendiri sebagai sumber data dalam bentuk dokumentasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang diperoleh dengan teknik wawancara dan data sekunder yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Wawancara atau *interview* merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden atau sumber informasi.

a. Wawancara Atau Interview

Teknik ini merupakan proses untuk mendapatkan informasi dengan cara mewawancarai dan terlibat secara langsung terhadap responden dengan sistematis serta berlandaskan pada tujuan penelitian. Data yang diperoleh dari wawancara ini dikelompokkan sebagai data primer. Adapun objek yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah para pengurus dan kader DPW PKB provinsi yogyakarta

b. Teknik Dokumentasi

Dengan teknik ini, penulis mengumpulkan data yang berasal buku-buku, arsip, website, dan catatan-catatan lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Data yang yang diperoleh dari dokumentasi ini di klasifikasikan ke dalam data sekunder.

Dalam penelitian ini ada beberapa responden yang kami perlukan guna mendapat informasi tentang sebab-sebab melorotnya suara PKB di DIY di pemilu 2009.

I. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif. Menurut Patton, yaitu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori, dan satuan uraian dasar⁵².

Proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Kemudian dilakukan reduksi data dengan jalan membuat abstraksi. Langkah selanjutnya adalah menyusun data dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu kemudian dikategorisasikan. Tahap terakhir adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah tahap ini selesai, maka baru dilakukan penafsiran data⁵³. Sehingga tahap-tahap dalam teknik analisa data kualitatif meliputi: pemrosesan satuan data, reduksi data, pengkategorisasian data termasuk pemeriksaan keabsahan data, dan penafsiran data.

⁵² Lexy Moloeng, Op.Cit, hlm. 103.

⁵³ Ibid., hlm. 190.